

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Probolinggo masih menghadapi beberapa permasalahan. Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan pendidikan yang sudah dikategorikan berdasarkan level permasalahan:

Tabel 3.1
 Permasalahan Pembangunan Pendidikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya aksesibilitas layanan pendidikan	Masih rendahnya rata-rata capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Belum maksimalnya daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah
			Belum meratanya siswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
2	Belum optimalnya Mutu layanan pendidikan	Masih rendahnya satuan pendidikan yang memiliki akreditasi dengan nilai minimal B	Penerapan kurikulum dan proses belajar mengajar belum maksimal
			Belum maksimalnya penerapan administrasi, manajemen, organisasi dan kelembagaan sekolah
			Masih belum meratanya kualitas sarana dan prasarana pendidikan
			Lemahnya peran komite sekolah
			Kualitas guru yang belum Optimal
			Rata-rata Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah
Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan	Pendistribusian Pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang terutama guru PNS		



Sedangkan permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Dinas Pendidikan

Aspek Kajian	Kondisi saat ini (%)	Standar yang di gunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Layanan OPD
			Internal	Eksternal	
APS 5 - 6 Tahun	70,57	SPM	Ketersediaan fasilitas layanan pendidikan dan Pendanaan pendidikan	Daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran
APS 7 -18 Tahun (Kesetaraan)	3,32	SPM			
APS 7 - 12 Tahun	98,69	SPM			
APS 13 - 15 Tahun	91,96	SPM			
Presentase PAUD Terakreditasi Minimal B	7,40	8 Standar Pendidikan	Kurikulum dan proses belajar mengajar, administrasi dan manajemen sekolah, organisasi dan kelembagaan sekolah, sarana prasarana, ketenagaan dan pendanaan pendidikan	Peran serta masyarakat	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran
Presentase Satuan Pendidikan Non Formal Terakreditasi Minimal B	12,80				
Presentase SD Terakreditasi Minimal B	72,40				
Presentase SMP Terakreditasi Minimal B	50,40				
Prosentase Guru yang bersertifikat pendidik	43,55	Standar Kompetensi			



3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan Kabupaten Probolinggo tidak dapat dilepaskan dari capaian – capaian yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Selain telah mencapai beberapa kemajuan yang telah diraih, juga masih menyisahkan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi yang mewakili Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Adapun visinya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing”

Visi tersebut dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yang berkaitan satu sama lain, makna tersebut dijelaskan oleh tabel berikut :

Tabel 3.3

Visi dan Misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya saing	Berakhlak Mulia	Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo menjadi suatu masyarakat yang memiliki kehidupan yang berperilaku, bersikap dan memiliki perbuatan yang sopan dan santun dalam keragaman masyarakat.
	Sejahtera	Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam keadaan yang makmur, sehat dan damai antar sesama dan dalam keberagaman masyarakat. Keadaan makmur dapat diartikan juga sebagai terwujudnya keutuhan kelestarian lingkungan, sehat dan damai antar sesama dan dalam keberagaman masyarakat.
	Berkeadilan	Mengandung arti bahwa pencapaian kesejahteraan adalah dimana keadaan masyarakatnya menyeluruh, tidak terjadi kesenjangan dengan berdasar kepada penanganan masalah – masalah yang dimiliki masyarakat Kabupaten Probolinggo sehingga menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek dikalangan masyarakat.



Visi	Pokok - Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Berdaya Saing	Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo memiliki tingkat produktivitas sehingga berkesanggupan atau berkemampuan untuk bersaing dalam menghasilkan output tertentu.

Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah – langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan di atas. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin di capai dengan menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan. Misi juga memberikan arah yang jelas sekaligus batasan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah direncanakan, maka rumusan Misi harus memiliki keterkaitan dengan Pokok-pokok visi sebagaimana diuraikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pokok – pokok Visi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

No.	Pokok – Pokok Visi	Misi / Sub-misi
1.	Berakhlak Mulia	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran.
2.	Sejahtera	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan
3.	Berkeadilan	Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
4.	Berdaya Saing	Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan

Tujuan dan Sasaran adalah tahap dimana dirumuskannya sasaran strategis yang dapat menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu untuk dilakukan agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, Tujuan dibuat berdarakan turunan dari setiap masing-masing misi yang telah ditetapkan dan tetap memperhatikan visi utama.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah diukur sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang sesuai dengan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, dan Continuously



Improve (SMART-C). Setiap sasaran memiliki indikator yang telah terukur dan terarah secara fokus agar pencapaiannya secara efektif dan efisien. Adapun secara detil rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo berdasarkan rumusan misi pada halaman berikut :



Tabel 3.5
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018-2023

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran.	Mewujudkan masyarakat yang tentram melalui ketertiban dan ketertiban umum serta pengembangan sikap toleran	Meningkatnya toleransi antar umat beragama	Indeks toleransi	71,5	72,0	72,25	72,5	72,75	73,0	73,0	Bakesbangpol, Disporaparbud, Setda Bag Kesra
			Meningkatnya ketertiban dan ketertiban umum	Persentase Penurunan Kasus Ketertiban dan ketertiban umum	1,00	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,05	Bakesbangpol, Satpol PP
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.	Meningkatnya kualitas pendidikan.	Indeks Pendidikan	0.53	0.54	0.54	0.55	0.55	0.56	0.56	Dispendik, Disperpusip
			Meningkatnya kualitas kesehatan.	Indeks Kesehatan	0.05	0.051	0.051	0.051	0.051	0.052	0.052	Dinkes, RSUD, DPPKB
		Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender, serta pengentasan kemiskinan.	Tertanganinya permasalahan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS	1,8%	2,13%	2,45%	2,82%	2,12%	3,47%	3,47%	Dinsos, DPPKB
			Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,15	3,75	3,50	3,25	3,00	2,75	2,75	Disnaker
		Meningkatkan Kesetaraan gender dalam Masyarakat.	Meningkatkan Kesetaraan gender dalam Masyarakat.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,86	66,21	66,59	66,96	67,33	67,70	67,70	DPPKB
			Terkendalinya jumlah penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	DPPKB
			9. Meningkatkan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	0,63	0,65	0,655	0,66	0,665	0,67	0,67	DPMD
			Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	69,15	69,25	69,5	69,75	71	71,25	71,25	DKPP



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah
3	Menuwujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD
				Nikai SAKIP	70,12	75,10	80,10	81,00	82,00	83,00	83,00	Setda Bag. Organisasi, Bappeda
				Indeks Profesionalitas ASN	75	76	77	78	79	80	80	Badan Kepegawaian Daerah
			11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	80	80	82	82	84	84	DPM PTSP, Dispenduk Capil, RS, Kecamatan
				Indeks SPBE	1,8	2,5	2,7	3,1	3,4	3,5	3,5	Diskominfo
4	Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan	5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	12. Meningkatnya PDRB sektor strategis	Persentase laju PDRB sektor strategis	29,93	29,98	30,11	30,71	31,22	31,84	31,84	DKPP, Diskan, Disnakeswan, Disporabud, Diperindag
			13. Meningkatnya iklim investasi	Persentase realisasi investasi	88,23	88,97	88,97	89,42	89,87	90,32	90,32	DPMPSTP
		6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan	14. Meningkatnya infrastruktur jalan dan irigasi	Indeks jalan berkeselamatan	0,11	0,14	0,17	0,20	0,23	0,26	0,26	Dishub, DPUPR
				Persentase luasan sawah teraliri	57	59	61	63	65	66	66	DPUPR, DKPP
			15. Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat	Persentase kawasan permukiman layak	70,00	70,00	71,00	71,50	72,00	72,50	72,50	DPKPP
		16. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Daya Tanggap Bencana	Indeks Kualitas Udara	82	82,5	83	83,5	84	84,5	84,5	DLH	
			Indeks Kualitas Air	48,5	48,75	49	49,25	49,5	49,75	49,75	DLH	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,821	54,827	54,834	54,84	54,847	54,853	54,853	DLH	
			Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	74,0	74,1	74,2	74,3	74,4	74,5	74,5	DPUPR	
					Indeks Risiko Bencana	194	194	193	192	191	190	190



3.3 Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Serta Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

1. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 - 2019 mengacu kepada Nawacita, Visi RPJMN 2015-2019 dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai Visi Kemendikbud, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
- b. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
- c. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
- d. Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan, serta Pengembangan Bahasa
- e. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
- b. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan Kebudayaan
- c. Peningkatan Akses PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
- d. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
- e. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
- f. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik



Pengembangan visi, misi dan tujuan strategi pembangunan pendidikan yang dicanangkan oleh Kemendikbud seperti yang telah diungkapkan di atas, dilandasi oleh paradigma pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai berikut.

a. Pendidikan untuk Semua

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis.

b. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan.

c. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

d. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

e. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.



f. Sekolah yang Menyenangkan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa.

g. Pendidikan Membangun Kebudayaan

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Bila dicermati renstra Kemendikbud 2015-2019 memiliki paradigma, gaya perumusan visi, misi dan tujuan pembangunan pendidikan yang berbeda dengan renstra sebelumnya. Pada renstra Kemendikbud 2015-2019 nampak jelas adanya keterkaitan yang jelas dan penjabaran yang tegas dengan visi dan misi pemerintah pada periode kekuasaan 2015-2019, yaitu Trisakti dan Nawacita, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin mengambil peran yang memadai dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan revolusi mental. Dengan sistematika yang berbeda dari renstra periode sebelumnya dan juga sistematika yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), maupun versi Kementerian Dalam Negeri, renstra Kemendikbud 2015-2019 berhasil disusun dengan lebih ringkas, dan nampak jelas keterkaitan antara kebijakan dan strategi pembangunan yang dikembangkan, dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang disebut dengan Nawacita. Pada bagian yang menguraikan kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan, diuraikan secara jelas setiap kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan yang dikembangkan oleh Kemendikbud dan kaitan serta kontribusinya untuk mencapai agenda prioritas pembangunan nasional Nawacita.

Dari hal tersebut dapatlah dipahami bahwa Kemendikbud melalui renstra yang disusunnya berupaya untuk sepenuhnya bisa memberikan kontribusi pada agenda prioritas pembangunan nasional utamanya yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan sumberdaya manusia,



yang notabene menjadi tugas dan tanggung jawab bidang pendidikan. Selain itu perlu digarisbawahi nilai gotong royong yang melandasi visi dalam renstra Kemendikbud 2015-2019 merupakan sesuatu yang sangat berbeda dengan renstra-renstra sebelumnya. Tak dapat pungkiri selama ini bidang pendidikan lebih mengutamakan nilai persaingan dibandingkan dengan dengan nilai yang telah mengakar kuat pada budaya bangsa, dan menjadi ciri positif masyarakat di negeri ini, yaitu gotong royong.

2. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Sejalan dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dan fungsi pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019, ditetapkanlah visi pendidikan dan kebudayaan (Dinas Pendidikan) Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

***“Terwujudnya Insan Yang Cerdas, Kreatif, Berakhlak Mulia
Dan Berdaya Saing Regional Dan Global”***

Untuk mengoperasionalkan dan mewujudkan visi pendidikan Provinsi Jawa Timur tersebut dinyatakan atau dirumuskan misi pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas;
- b. Meningkatkan sumber daya manusia bidang pendidikan;

Untuk mewujudkan misi pendidikan dapat ditetapkan tujuan pembangunan pendidikan di Jawa Timur sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- b. Meningkatkan kompetensi dan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dipaparkan bahwa visi pendidikan dan kebudayaan (Dinas Pendidikan) Provinsi Jawa Timur tersebut diarahkan untuk mewujudkan insan cerdas secara menyeluruh dan utuh, yaitu yang mampu menjadikan dirinya berpengetahuan dan berakhlak mulia agar mampu berpola-pikir, beradab, bersikap dan berperilaku manusiawi, kreatif, dan



produktif sehingga memiliki daya saing dan daya sanding (coopetition) global, regional, dan nasional secara serempak mengingat pada masa sekarang, lebih-lebih pada masa depan, antara yang global, regional, dan nasional bertumpang tindih dan saling melapis. Paparan visi di atas mengandung empat pokok pikiran, yaitu: (1) insan cerdas, (2) berakhlak mulia, (3) kreatif, dan (4) berdaya saing dan berdaya sanding nasional dan global.

Insan cerdas dimaknai sebagai manusia yang sempurna perkembangan akal budinya sehingga memiliki kejernihan ruhani, kecendekiaan otak-pikiran, ketajaman rasa, dan kesehatan-kebugaran-kekuatan raga serta ketahanan mental yang merupakan satu keseluruhan dan keutuhan. Insan berakhlak mulia dimaknai sebagai manusia yang memiliki watak, adab, susila, perangai, dan tabiat berharga, terpuji, dan tinggi sehingga memiliki susila dan perangai terpuji dan tinggi sebagai manusia yang bemarkah, berharkat, dan bermartabat dalam kehidupan sehari-hari. Insan kreatif dimaknai sebagai manusia yang berbekal kecerdasan menyeluruh, berpengetahuan baik, dan berakhlak mulia agar mampu berpikir, bersikap, dan bertindak selaras dengan asas-asas kemanusiaan dan adab. Insan yang memiliki daya saing dan daya sanding nasional dan global dimaknai sebagai manusia yang memiliki kekuatan, kemampuan, kemahiran, dan kecakapan bersaing sekaligus bekerja sama (coopetition) atau beradu sekaligus berunding secara serempak pada tataran nasional dan global.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam mewujudkan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Probolinggo meliputi :

- a. Perwujudan pusat kegiatan berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi:
 - 1) Pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan lokal (PKL);
 - 2) Pengembangan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp);
 - 3) Pemantapan fungsi pengembangan kawasan (PPK);
 - 4) Pemantapan fungsi pengembangan lingkungan (PPL); dan
 - 5) Pengembangan pusat agropolitan; dan
 - 6) Pengembangan pusat minapolitan.



- b. Pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan lokal (PKL) berupa pembangunan perkotaan Kraksaan, meliputi :
 - 1) Pembangunan pusat pemerintahan kabupaten;
 - 2) Pembangunan pusat pendidikan skala kabupaten;
 - 3) Pembangunan pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten;
 - 4) Pembangunan pusat perdagangan dan jasa regional;
 - 5) Pengembangan islamic centre;
 - 6) Pembangunan terminal tipe B; dan
 - 7) Pengembangan industri pengolahan ikan.
- c. Pengembangan pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) meliputi:
 - 1) Kecamatan Tongas;
 - 2) Kecamatan Wonomerto;
 - 3) Kecamatan Leces;
 - 4) Kecamatan Gading;
 - 5) Kecamatan Paiton.
- d. Pemantapan fungsi pengembangan kawasan (PPK) meliputi:
 - 1) Kecamatan Lumbang;
 - 2) Kecamatan Sukapura;
 - 3) Kecamatan Sumberasih;
 - 4) Kecamatan Bantaran;
 - 5) Kecamatan Kuripan;
 - 6) Kecamatan Sumber;
 - 7) Kecamatan Dringu;
 - 8) Kecamatan Gending;
 - 9) Kecamatan Tegalsiwalan;
 - 10) Kecamatan Banyuanyar;
 - 11) Kecamatan Maron;
 - 12) Kecamatan Krejengan;
 - 13) Kecamatan Pajarakan;
 - 14) Kecamatan Besuk;
 - 15) Kecamatan Krucil;
 - 16) Kecamatan Tiris.
- e. Pemantapan fungsi pengembangan lingkungan (PPL) meliputi :
 - 1) Pengembangan pusat kegiatan klaster industri dan kerajinan etnik meliputi wisata industri, produk heritage dan pengembangan ekonomi berbasis kerajinan di Desa Randu Putih, Kecamatan Dringu yang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);



- 2) Pengembangan Desa Jorong Kecamatan Leces sebagai PPL dengan pengembangan utama menjadi klaster industri mebel dan konveksi;
 - 3) Pengembangan Desa Krucil sebagai pendukung kawasan agropolitan;
 - 4) Pengembangan Desa Ngepung, Kecamatan Sukapura;
 - 5) Pengembangan Desa Tukul, Kecamatan Sumber;
 - 6) Pengembangan Desa Jatisari, Kecamatan Kuripan;
 - 7) Pengembangan Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran;
 - 8) Pengembangan Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan;
 - 9) Pengembangan Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar;
 - 10) Pengembangan Desa Mojolegi, Kecamatan Gading;
 - 11) Pengembangan Desa Glagah, Kecamatan Pakuniran;
 - 12) Pengembangan Desa Kedungrejoso, Kecamatan Kotaanyar;
 - 13) Pengembangan Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton;
 - 14) Pengembangan Desa Sumberan, Kecamatan Besuk;
 - 15) Pengembangan Desa Sentong, Kecamatan Krejengan;
 - 16) Pengembangan Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan;
 - 17) Pengembangan Desa Brumbungan Kidul, Kecamatan Maron;
 - 18) Pengembangan Desa Klaseman, Kecamatan Gending;
 - 19) Pengembangan Desa Poh Sangit Lor, Kecamatan Wonomerto;
 - 20) Pengembangan Desa Purut, Kecamatan Lumbang;
 - 21) Pengembangan Desa Tambakrejo, Kecamatan Tongas; dan
 - 22) pengembangandesadesa Pesisir, Kecamatan Sumberasih.
- f. Pengembangan pusat agropolitan meliputi:
- 1) Pengembangan Agropolitan di Desa Krucil, Kecamatan Krucil dengan kegiatan utama sebagai pusat pengembangan peternakan sapi perah;
 - 2) Pengembangan Agropolitan di Kecamatan Lumbang, Sukapura dan Sumber, Tiris dan Krucil sebagai Agropolitan dengan kegiatan utama sebagai pusat pengembangan perkebunan dan hortikultura.
- g. Pengembangan pusat minapolitan meliputi pengembangan minapolitan di Kecamatan Tongas, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Dringu, Kecamatan Gending, Kecamatan Pajarakan, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Paiton, Kecamatan



Banyuanyar, Kecamatan Maron, Kecamatan Gading, Kecamatan Tegalsiwalandan Kecamatan Tiris.

- h. Perwujudan struktur ruang dapat terlaksana dengan didukung adanya rencanarinci kabupaten terutama untuk PKL, PKLp, PPK, kawasan perdesaan, prasaranautama, prasarana penunjang dan kawasan strategis yang disahkan dalam peraturan daerah.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat dijadikan sebagai pertimbangan. Adapun fungsi dari KLHS RPJMD ini adalah untuk memastikan bahwa isu-isu permasalahan strategis, dan sasaran strategis tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Probolinggo masuk dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo maupun Renstra.

Skenario yang telah di rumuskan dijabarkan juga berdasarkan isu strategis per tujuan pembangunan berkelanjutan. Berikut isu strategis untuk setiap tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) :

- a. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
 - 1) Sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif (dikurangi beban, ditambah kemampuannya, dan ditambahkan akses) dan tepat sasaran (data by name by address)
 - 2) Peningkatan pelayanan dasar
 - 3) Peningkatan cakupan peserta jaminan sosial bidang kesehatan dan ketenagakerjaan
 - 4) Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak
 - 5) Peningkatan akses listrik bagi semua kalangan
 - 6) Optimalisasi peran stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat
 - 7) Peningkatan partisipasi kelompok difabel dalam pembangunan
 - 8) Feminisme kemiskinan dan peningkatan bantuan tepat sasaran
 - 9) Penurunan angka putus sekolah SD, SMP, dan (SMA sederajat)
 - 10) Peningkatan angka partisipasi murni, terutama tingkat SMP dan (SMA Sederajat)
- b. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
 - 1) Optimalisasi lahan rumah untuk ketersediaan pangan bergizi masyarakat.
 - 2) Peningkatan konsumsi pangan non beras



- 3) Peningkatan kesadaran perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS)
 - 4) Meningkatkan distribusi dan nilai tambah produk perikanan dan peternakan.
 - 5) Stabilisasi harga komoditas pertanian dan perkebunan, serta Ketersediaan sarana pertanian dan perkebunan
 - 6) Peningkatan sarana dan prasarana RPH dan pasca panen sesuai SOP
 - 7) Pengelolaan limbah ternak padat maupun cair
 - 8) Pengembangan Pertanian Organik
- c. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- 1) Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
 - 2) Penurunan penyakit menular
 - 3) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program Keluarga Berencana
 - 4) Pemerataan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 - 5) Peningkatan rasio tenaga medis
- d. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- 1) Penurunan angka putus sekolah SD, SMP, dan (SMA sederajat)
 - 2) Peningkatan angka partisipasi murni, terutama tingkat SMP dan (SMA Sederajat)
 - 3) Peningkatan angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Probolinggo
 - 4) Peningkatan Akses layanan Pendidikan (sarpras pendidikan, tenaga pendidik)
 - 5) Pengendalian kenakalan remaja
 - 6) Peningkatan minat baca masyarakat
 - 7) Penambahan koleksi buku perpustakaan
 - 8) Pengembangan perpustakaan desa
 - 9) Peningkatan angka partisipasi kasar PAUD
- e. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan)
- 1) Peningkatan kesetaraan gender dalam berbagai profesi dan pekerjaan
 - 2) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender
 - 3) Peningkatan pemahaman kesadaran kesetaraan gender sejak dini



- 4) peningkatan perlindungan terhadap kekerasan anak dan perempuan
 - 5) Peningkatan ketrampilan perempuan
 - 6) Penurunan rasio KDRT
 - 7) Angka Partisipasi Kasar SMA sederajat
 - 8) Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
- f. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
- 1) Peningkatan kualitas air minum yang layak dikonsumsi
 - 2) Peningkatan akses air minum layak
 - 3) Peningkatan kapasitas pengelolaan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM).
 - 4) Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak
 - 5) Merubah perilaku masyarakat menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - 6) Membangun Instalasi Pengelola Air Limbah (IPAL) Komunal di setiap Desa
 - 7) Peningkatan Indeks Kualitas Air
- g. Tercapainya Peningkatan Area yang memanfaatkan Sumber Energi yang terbarukan
- 1) Peningkatan akses listrik bagi masyarakat pedesaan
- h. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
- 1) Penurunan laju inflasi Kabupaten Probolinggo
 - 2) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka
 - 3) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui sektor pariwisata
 - 4) Peningkatan PDRB Per Kapita
- i. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- 1) Peningkatan aksesibilitas angkutan barang
 - 2) Pembangunan jalan dan jembatan
- j. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneegara
- 1) Sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif (dikurangi beban, ditambah kemampuannya, dan ditambahkan akses) dan tepat sasaran (data by name by address)



- 2) Peningkatan pelayanan dasar
- 3) Optimalisasi peran stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat
- 4) Feminism kemiskinan dan peningkatan bantuan tepat sasaran

Sedangkan pembagian Peran untuk Dinas Pendidikan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) kedepan:



Tabel 3.6
Pembagian Peran antara Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah

NO. TPB	TUJUAN TPB	PILAR	PERAN	URUSAN	ORGANISASI PELAKSANAAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B		
			Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat		
			Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat		
			Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun		
			Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
			Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender		
			Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender		
			Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender		
			Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender		
			Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun		
			Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun		

Sumber

:

Kajian

Lingkungan

Hidup

Strategis

(KLHS)



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang masih menghadang pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telaah atas visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaah Renstra Kemendikbud 2015-2019, telaah renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2015 - 2019 dan telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dapat dirumuskan isu-isu strategis pendidikan di Kabupaten Probolinggo, yang memerlukan perhatian dalam mengembangkan rencana strategis pembangunan pendidikan. Isu-isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya Perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Probolinggo.
2. Keterbatasan wewenang dan urusan pendidikan antara lembaga dibawah Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dengan lembaga dibawah Kemenag
3. Rendahnya angka capaian keberhasilan kualitas pendidikan ditataran Kab/Kota provinsi Jawa Timur sehingga belum mampu bersaing dalam persaingan
4. Belum maksimalnya peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan;
5. Masih rendahnya Angka melek Huruf
6. Masih rendahnya Angka Rata – rata lama sekolah
7. Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah
8. Perlunya peningkatan Kompetensi guru.
9. Masih tingginya disparitas kualitas pendidikan antar kecamatan di Kabupaten Probolinggo;
10. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
11. Belum efektifnya pengembangan dan implementasi kurikulum muatan lokal utamanya untuk pendidikan yang mengacu pada pelestarian budaya;
12. Masih rendahnya kualitas pendidikan nonformal dan informal;
13. Masih rendahnya tingkat literasi dan minat baca di kalangan masyarakat baik yang masih berusia sekolah maupun yang telah menyelesaikan pendidikan;
14. Belum efektifnya implementasi penerapan kurikulum 2013 pada berbagai jenjang dan jalur pendidikan;
15. Masih rendahnya daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah (APS)



16. Rendahnya APK dan APM di tingkat pendidikan menengah;
17. Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik pada pendidikan khusus dan layanan khusus (untuk semua jenjang pendidikan) di Kabupaten Probolinggo;
18. Belum optimalnya pendataan semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah di Kabupaten Probolinggo yang berkesempatan menikmati layanan pendidikan yang sesuai;
19. Masih terdapat anak putus sekolah
20. Kesenjangan kompetensi siswa antar sekolah;
21. Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
22. Persebaran pendidik belum proporsional;
23. Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi;
24. Tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan non formal;
25. Masih sering terjadi perundungan pada pelajar.
26. Belum adanya standar baku penilaian kinerja aparat dinas dan pengelola pendidikan, dimana reward and punishment belum menjadi bagian utama dalam indicator keberhasilan kinerja.
27. Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang masih belum optimal di bidang pendidikan baik dari segi teknologi peralatan hardware dan software yang digunakan maupun sumber daya manusia.
28. Keterbatasan anggaran yang tersedia di Kabupaten Probolinggo dalam pengelolaan di bidang pendidikan.

